

**Kekuatan Kelompok Keagamaan sebagai Alat
Kepentingan Aktor Politik Lokal pada Pilkada 2024 di
Kota Pematangsiantar (Studi Kasus Naposobulung
HKBP Siantar Timur Ressort Siantar Timur)**

*The Power of Religious Groups as a Tool for Local Political Actors in the
2024 Regional Elections in Pematangsiantar City (Case Study
Naposobulung HKBP Siantar Timur Ressort Siantar Timur)*

Agatha Dwi Natania Panjaitan
Universitas Sumatera Utara, Indonesia
Email: agatha.pjtn@gmail.com

Faisal Andri Mahrawa
Universitas Sumatera Utara, Indonesia
Email: faisal.andri@usu.ac.id

Article Info

Received : 15 January 2026
Revised : 20 January 2026
Accepted : 23 January 2026
Published : 1 February 2026

Keywords: Naposobulung HKBP,
Political Mobilization,
2024 Regional Elections,
Dalihan na Tolu

Kata kunci: Naposobulung HKBP,
Mobilisasi Politik,
Pilkada 2024, Dalihan na
Tolu

Abstract

This research examines how the strength of Naposobulung HKBP as a religious group is used as a tool for interests by local political actors in the 2024 Pematangsiantar City elections. This research aims to describe the mechanisms, motivations, and impacts of utilizing Naposobulung as a political tool. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation. The research results show that local political actors implement various strategies both symbolically and materially based on the Dalihan na Tolu philosophy to gain moral legitimacy and cultural solidarity from Naposobulung. Political actors utilize church social networks, diaconal activities, and community values to build voter loyalty, while youth groups experience an increase in social roles along with the risk of religious politicization. However, in the 2024 regional elections, there was a significant decline in the practical role of Naposobulung due to weak internal consolidation and the church leaders' stance of limiting political activities, although the cultural solidarity values based on the Dalihan na Tolu philosophy were still preserved. The socio-religious potential of this group has not been completely lost; with the reorganization of functions, strengthening of internal coordination, and the opening of political dialogue spaces by church leaders, Naposobulung can once again support participatory democracy. Recommendations include adapting mobilization strategies, enhancing political literacy among youth, and formulating internal church policies that balance religious roles and democratic interests.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji bagaimana kekuatan Naposobulung HKBP sebagai kelompok keagamaan digunakan sebagai alat kepentingan oleh aktor politik lokal dalam pemilihan umum Kota Pematangsiantar 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme, motivasi, dan dampak penggunaan Naposobulung sebagai alat politik. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor politik lokal menerapkan berbagai strategi baik secara simbolis maupun material berdasarkan filosofi Dalihan na Tolu untuk memperoleh legitimasi moral dan solidaritas budaya dari Naposobulung. Aktor politik memanfaatkan jaringan sosial gereja, kegiatan diakonat, dan nilai-nilai masyarakat untuk membangun loyalitas pemilih, sementara kelompok pemuda mengalami peningkatan peran sosial bersamaan dengan risiko politisasi agama. Namun, dalam pemilihan umum daerah 2024, terjadi penurunan signifikan dalam peran praktis Naposobulung karena lemahnya konsolidasi internal dan sikap pemimpin gereja yang membatasi kegiatan politik, meskipun nilai-nilai solidaritas budaya berdasarkan filosofi Dalihan na Tolu masih tetap terjaga. Potensi sosial-religius kelompok ini belum sepenuhnya hilang; dengan reorganisasi fungsi, penguatan koordinasi internal, dan pembukaan ruang dialog politik oleh para pemimpin gereja, Naposobulung dapat sekali lagi mendukung demokrasi partisipatif. Rekomendasi meliputi adaptasi strategi mobilisasi, peningkatan literasi politik di kalangan pemuda, dan perumusan kebijakan internal gereja yang menyeimbangkan peran keagamaan dan kepentingan demokrasi.

How to cite: Agatha Dwi Natania Panjaitan, Faisal Andri Mahrawa. "Kekuatan Kelompok Keagamaan sebagai Alat Kepentingan Aktor Politik Lokal pada Pilkada 2024 di Kota Pematangsiantar (Studi Kasus Naposobulung HKBP Siantar Timur Ressort Siantar Timur)", *LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 3, No. 1 (2026): 1-8. <https://litera-academica.com/ojs/litera/index>.

Copyright: 2026, Agatha Dwi Natania Panjaitan, Faisal Andri Mahrawa



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Keterlibatan kelompok keagamaan dalam arena politik lokal merupakan fenomena yang terus menguat dalam praktik demokrasi di Indonesia, khususnya pada konteks pemilihan kepala daerah. Dalam masyarakat yang memiliki ikatan sosial dan kultural yang kuat, kelompok keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai institusi spiritual, tetapi juga sebagai ruang produksi legitimasi sosial dan politik. Kondisi ini membuka peluang bagi aktor politik lokal untuk memanfaatkan jejaring keagamaan sebagai instrumen mobilisasi dukungan elektoral.

Pada Pilkada 2024 di Kota Pematangsiantar, dinamika tersebut terlihat melalui relasi antara aktor politik lokal dan Naposobulung HKBP, yakni organisasi kepemudaan gereja dalam struktur Huria Kristen Batak Protestan (HKBP). Naposobulung memiliki posisi strategis karena beranggotakan pemuda gereja yang aktif, memiliki jejaring sosial luas, serta berakar kuat pada nilai-nilai

kultural Batak Toba, khususnya filosofi Dalihan na Tolu. Kombinasi antara identitas keagamaan, solidaritas kultural, dan peran sosial pemuda menjadikan Naposobulung potensial sebagai medium mobilisasi politik.

Namun demikian, keterlibatan kelompok keagamaan dalam politik elektoral tidak selalu berjalan secara linear dan efektif. Di satu sisi, pemanfaatan kelompok religius dapat memperkuat partisipasi politik dan memperluas basis dukungan demokratis. Di sisi lain, praktik tersebut berisiko melahirkan politisasi agama, fragmentasi internal kelompok, serta konflik nilai antara kepentingan keagamaan dan kepentingan politik praktis. Ketegangan ini menjadi semakin relevan ketika institusi gereja secara normatif berupaya menjaga jarak dari aktivitas politik elektoral.

Penelitian ini berangkat dari kondisi empiris menurunnya peran praktis Naposobulung HKBP dalam Pilkada 2024 dibandingkan periode sebelumnya, meskipun secara kultural dan sosial kelompok ini tetap memiliki modal solidaritas yang kuat. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana mekanisme pemanfaatan kelompok keagamaan oleh aktor politik lokal, apa motivasi yang melatarbelakanginya, serta sejauh mana efektivitas mobilisasi politik yang dihasilkan.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, artikel ini menganalisis peran Naposobulung HKBP sebagai alat kepentingan aktor politik lokal dalam Pilkada 2024 di Kota Pematangsiantar. Fokus utama penelitian diarahkan pada strategi mobilisasi politik yang digunakan, relasi aktor politik dengan struktur gereja dan pemuda, serta dampak sosial-politik yang muncul bagi kelompok Naposobulung itu sendiri. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus tentang politik identitas, mobilisasi keagamaan, dan demokrasi lokal di Indonesia, khususnya pada konteks politik elektoral berbasis komunitas religius.

Penelitian ini secara khusus mengkaji bentuk relasi yang terbangun antara aktor politik dan struktur pemuda gereja, strategi mobilisasi yang digunakan, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas keterlibatan kelompok keagamaan dalam politik elektoral lokal.

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa meskipun Naposobulung HKBP memiliki modal sosial dan kultural yang kuat, perannya dalam Pilkada 2024 cenderung bersifat terbatas dan tidak terinstitusionalisasi secara formal. Keterlibatan kelompok ini lebih banyak dimanfaatkan secara simbolik dan pragmatis oleh aktor politik, tanpa menghasilkan mobilisasi politik yang solid dan berkelanjutan. Temuan ini menegaskan adanya ketegangan antara identitas keagamaan, kepentingan politik praktis, dan upaya institusi gereja dalam menjaga netralitasnya di ruang publik.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis untuk mengkaji peran kelompok keagamaan sebagai alat kepentingan aktor politik lokal dalam konteks politik elektoral. Penelitian

disusun dalam bentuk studi kasus dengan fokus pada Naposobulung HKBP dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kota Pematangsiantar. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam dinamika relasi, strategi, serta makna politik yang dibangun oleh aktor politik dan kelompok keagamaan dalam konteks sosial tertentu.

Lokasi penelitian berada di Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, yang dipilih karena memiliki karakteristik sosial-keagamaan yang kuat serta posisi strategis HKBP sebagai institusi keagamaan dominan di wilayah tersebut. Naposobulung HKBP ditetapkan sebagai unit analisis karena memiliki struktur organisasi yang jelas, basis anggota pemuda yang aktif, serta kedekatan historis dengan aktivitas sosial dan politik di tingkat lokal.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan kunci yang terdiri dari pengurus dan anggota Naposobulung HKBP, tokoh gereja, serta pihak-pihak yang memahami dinamika politik lokal selama Pilkada 2024. Observasi dilakukan untuk menangkap pola interaksi dan bentuk partisipasi organisasi, sedangkan dokumentasi mencakup arsip organisasi gereja, dokumen terkait Pilkada, serta sumber sekunder berupa laporan dan pemberitaan media. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dikategorikan dan diinterpretasikan secara sistematis untuk mengidentifikasi bentuk mobilisasi politik, pola relasi antara aktor politik dan kelompok keagamaan, serta implikasi sosial-politik dari keterlibatan tersebut. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode guna memastikan konsistensi dan validitas temuan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil penelitian sekaligus pembahasan analitis mengenai keterlibatan Naposobulung HKBP dalam Pilkada 2024 di Kota Pematangsiantar. Pembahasan difokuskan pada strategi aktor politik lokal, posisi Naposobulung HKBP dalam relasi tersebut, serta implikasi politik identitas yang muncul dalam praktik politik elektoral lokal.

3.1. Strategi Aktor Politik Lokal dalam Memanfaatkan Kelompok Keagamaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor politik lokal memandang kelompok keagamaan sebagai salah satu sumber modal sosial yang strategis dalam kontestasi politik elektoral. Dalam konteks ini, Naposobulung HKBP diposisikan bukan semata-mata sebagai komunitas keagamaan, tetapi sebagai jaringan sosial yang memiliki kohesi internal, loyalitas kelompok, serta pengaruh simbolik yang kuat di tingkat lokal. Karakteristik tersebut menjadikan kelompok ini potensial untuk dimobilisasi sebagai basis dukungan politik, terutama dalam masyarakat yang masih menempatkan agama dan ikatan komunal sebagai rujukan penting dalam pengambilan keputusan politik.

Strategi yang digunakan oleh aktor politik lokal tidak dilakukan secara terbuka, formal, atau melalui mekanisme organisasi yang terstruktur. Sebaliknya, pendekatan yang ditempuh cenderung bersifat informal, personal, dan relasional. Aktor politik lebih memilih menjalin komunikasi melalui individu-individu kunci yang memiliki posisi strategis dan legitimasi sosial di dalam komunitas gereja, seperti pengurus Naposobulung, tokoh pemuda yang aktif, maupun figur-figur yang dihormati secara kultural dan religius. Melalui perantara tokoh-tokoh tersebut, aktor politik berupaya menanamkan pengaruh secara halus tanpa menimbulkan kesan intervensi politik yang berlebihan terhadap ruang keagamaan.

Dalam praktiknya, aktor politik memanfaatkan simbol-simbol keagamaan dan kedekatan emosional sebagai instrumen utama untuk membangun citra kedekatan dengan komunitas gereja. Kehadiran dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti perayaan hari besar gerejawi, kegiatan sosial, dan pertemuan pemuda, menjadi sarana untuk menunjukkan kepedulian dan keterlibatan. Selain itu, dukungan terhadap agenda sosial gereja – baik dalam bentuk bantuan material, fasilitasi kegiatan, maupun dukungan moral – digunakan sebagai bentuk investasi sosial yang diharapkan dapat berujung pada simpati politik. Narasi kesamaan identitas, baik yang bersifat kultural maupun religius, juga dimanfaatkan untuk memperkuat kesan bahwa aktor politik tersebut merupakan bagian dari komunitas atau setidaknya memiliki kedekatan nilai dengan kelompok keagamaan yang bersangkutan.

Temuan ini menunjukkan bahwa proses mobilisasi politik dalam konteks kelompok keagamaan tidak berlangsung melalui instruksi langsung, komando politik, atau penggunaan struktur organisasi gereja secara formal. Sebaliknya, mobilisasi dilakukan melalui pembentukan persepsi, pengelolaan simbol, dan pembangunan relasi emosional di tingkat akar rumput. Pendekatan semacam ini menempatkan kelompok keagamaan sebagai ruang sosial yang dapat dipengaruhi secara tidak langsung, dengan mengandalkan kepercayaan interpersonal dan otoritas moral tokoh-tokoh internal sebagai medium utama.

Namun demikian, penelitian ini juga mengungkap bahwa strategi aktor politik lokal dalam memanfaatkan Naposobulung HKBP cenderung bersifat pragmatis dan berorientasi jangka pendek. Relasi yang dibangun lebih banyak diarahkan pada kepentingan elektoral sesaat, terutama menjelang momentum pemilihan, tanpa diikuti oleh upaya sistematis untuk membangun hubungan kelembagaan yang berkelanjutan. Tidak ditemukan pola kemitraan jangka panjang, program pemberdayaan berkelanjutan, maupun komitmen politik yang konsisten terhadap isu-isu yang menjadi perhatian komunitas gereja.

Akibat dari pendekatan yang bersifat temporer tersebut, keterlibatan kelompok keagamaan dalam proses politik menjadi lebih bersifat simbolik daripada substantif. Dukungan yang muncul cenderung cair, tidak terorganisasi secara solid, dan mudah berubah seiring dengan dinamika politik lokal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kelompok keagamaan memiliki potensi besar

sebagai modal sosial politik, pemanfaatannya yang tidak diiringi dengan konsolidasi institusional justru membatasi efektivitas strategi aktor politik dalam membangun basis dukungan yang kuat dan berkelanjutan.

3.2. Posisi Naposobulung HKBP dalam Dinamika Politik Elektoral

Dalam dinamika Pilkada 2024, Naposobulung HKBP menempati posisi yang cenderung ambigu dan berada pada wilayah antara peran keagamaan, sosial, dan politik. Di satu sisi, Naposobulung HKBP merupakan komunitas pemuda gereja yang secara struktural berada di bawah naungan institusi gereja, dengan mandat utama pada pembinaan iman, penguatan solidaritas sosial, serta pengembangan kapasitas generasi muda. Dalam kerangka normatif tersebut, gereja secara tegas menekankan prinsip netralitas politik serta menjaga jarak dari keterlibatan langsung dalam politik praktis. Prinsip ini kemudian terinternalisasi dalam sikap organisasi Naposobulung HKBP secara kelembagaan, sehingga tidak terdapat kebijakan resmi, instruksi organisasi, maupun sikap politik terbuka yang mendukung kandidat tertentu dalam kontestasi Pilkada.

Netralitas kelembagaan ini tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan terhadap aturan gerejawi, tetapi juga sebagai upaya menjaga integritas moral gereja di tengah polarisasi politik lokal. Gereja berupaya mempertahankan posisinya sebagai ruang pemersatu umat, bukan sebagai arena kompetisi kepentingan politik. Konsekuensinya, Naposobulung HKBP sebagai bagian dari struktur gereja diarahkan untuk fokus pada kegiatan spiritual, sosial, dan pelayanan kemasyarakatan, serta menghindari penggunaan simbol dan forum gereja untuk kepentingan politik elektoral.

Namun demikian, pada tataran individual, anggota Naposobulung HKBP tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial dan politik di sekitarnya. Sebagai warga negara, para anggota memiliki hak politik, preferensi ideologis, serta kepentingan pragmatis yang beragam. Penelitian ini menemukan bahwa pilihan politik anggota dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kedekatan personal dengan aktor politik lokal, pertimbangan kekerabatan dan kultural, isu-isu kesejahteraan, hingga ekspektasi terhadap perubahan sosial di tingkat lokal. Relasi informal yang terbangun antara sebagian anggota dengan aktor politik juga turut membentuk pola partisipasi politik yang bersifat personal dan tidak terkoordinasi secara organisasi.

Partisipasi politik anggota Naposobulung HKBP dalam Pilkada 2024 dengan demikian lebih banyak berlangsung dalam kapasitas individu, bukan sebagai representasi atau mandat dari organisasi. Tidak terdapat mekanisme kolektif yang mengarahkan pilihan politik anggota secara seragam. Hal ini menyebabkan Naposobulung HKBP tidak berfungsi sebagai mesin politik kolektif, meskipun secara kuantitatif memiliki basis anggota yang relatif besar dan secara kualitatif memiliki jaringan sosial yang kuat. Fragmentasi preferensi politik di tingkat individu membuat potensi mobilisasi kolektif menjadi terdispersi dan tidak terakumulasi menjadi kekuatan politik yang signifikan.

Kondisi tersebut menjelaskan mengapa peran Naposobulung HKBP dalam Pilkada 2024 relatif terbatas jika dibandingkan dengan potensi sosial dan kultural yang dimilikinya. Ketiadaan sikap politik organisasi secara resmi, ditambah dengan kehati-hatian institusi gereja dalam menjaga independensi dan netralitasnya, menjadikan Naposobulung HKBP lebih berfungsi sebagai ruang sosial pemuda yang bersifat inklusif dan non-partisan. Dalam posisi ini, organisasi lebih berperan sebagai wadah interaksi, pembentukan identitas, dan penguatan solidaritas generasi muda gereja, daripada sebagai instrumen mobilisasi politik yang efektif.

Dengan demikian, Naposobulung HKBP berada dalam posisi paradoks: di satu sisi memiliki modal sosial yang besar dan daya pengaruh kultural yang signifikan, namun di sisi lain terikat oleh norma kelembagaan dan nilai-nilai keagamaan yang membatasi keterlibatan langsung dalam politik elektoral. Posisi ini mencerminkan dinamika relasi yang kompleks antara agama dan politik di tingkat lokal, di mana kelompok keagamaan berupaya menegosiasikan perannya agar tetap relevan secara sosial tanpa kehilangan legitimasi moral dan independensinya di tengah kompetisi politik elektoral.

3.3. Implikasi Politik Identitas dalam Pilkada Lokal

Keterlibatan Naposobulung HKBP dalam Pilkada 2024, meskipun terbatas, mencerminkan praktik politik identitas yang masih relevan dalam konteks politik lokal. Identitas keagamaan dan kultural digunakan sebagai instrumen untuk membangun kedekatan emosional antara aktor politik dan pemilih, tanpa harus melalui mobilisasi struktural yang eksplisit. Hal ini menunjukkan bahwa politik identitas tidak selalu hadir dalam bentuk yang konfrontatif, tetapi dapat beroperasi secara halus dan simbolik.

Implikasi dari praktik tersebut adalah munculnya ketegangan antara nilai-nilai keagamaan dan kepentingan politik praktis. Di satu sisi, pemanfaatan identitas keagamaan dapat meningkatkan partisipasi politik dan rasa keterwakilan komunitas. Di sisi lain, praktik ini berpotensi mereduksi peran kelompok keagamaan menjadi sekadar alat legitimasi politik, tanpa memberikan ruang partisipasi substantif dalam proses pengambilan keputusan politik.

Temuan ini menegaskan bahwa politik identitas dalam Pilkada lokal cenderung bersifat instrumental dan bergantung pada kepentingan aktor politik. Ketiadaan konsolidasi internal di tubuh kelompok keagamaan serta sikap institusi gereja yang menjaga jarak dari politik praktis membatasi dampak politik identitas tersebut. Dengan demikian, politik identitas dalam konteks ini lebih berfungsi sebagai strategi simbolik daripada sebagai basis mobilisasi politik yang berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan kelompok keagamaan, khususnya Naposobulung HKBP, dalam Pilkada 2024 di Kota Pematangsiantar berlangsung dalam batas yang relatif terbatas dan tidak terinstitusionalisasi

secara formal. Meskipun kelompok ini memiliki modal sosial dan kultural yang kuat sebagai komunitas pemuda gereja, pemanfaatannya oleh aktor politik lokal lebih bersifat simbolik dan pragmatis, tanpa menghasilkan mobilisasi politik kolektif yang berkelanjutan.

Temuan ini menegaskan bahwa strategi aktor politik lokal dalam memanfaatkan kelompok keagamaan cenderung mengandalkan pendekatan personal dan penggunaan simbol identitas, bukan melalui penguatan relasi kelembagaan yang sistematis. Di sisi lain, posisi Naposobulung HKBP yang berada dalam struktur gereja dengan prinsip netralitas politik membatasi ruang keterlibatan organisasi secara langsung dalam politik elektoral. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara identitas keagamaan, kepentingan politik praktis, dan upaya menjaga independensi institusi keagamaan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa politik identitas tidak selalu beroperasi sebagai alat mobilisasi elektoral yang efektif, tetapi sering kali berfungsi sebagai strategi simbolik yang bergantung pada konteks sosial dan kelembagaan. Temuan ini membuka ruang bagi penelitian lanjutan untuk mengkaji secara komparatif peran kelompok keagamaan lain dalam politik lokal serta dinamika relasi antara agama dan kekuasaan dalam sistem demokrasi elektoral.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, G. A., & Powell, G. B. (1966). "Comparative politics: A developmental approach". Little, Brown.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). "Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches" (4th ed.). SAGE.
- HKBP Synod. (2023). "Pedoman pelayanan gereja dalam konteks politik lokal". Tarutung: HKBP Press.
- KPU Sumatera Utara. (2024). "Laporan hasil Pilkada Kota Pematangsiantar 2024". Medan: KPU Sumut.
- Lumbanbatu, S. (2019). Dalihan na tolu sebagai modal sosial dalam kehidupan masyarakat Batak Toba. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(2), 110-120.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE.
- Noor, F. (2009). *Menimbang masa depan sistem presidensial di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Purwoko. (2020). Sistem politik dan pemerintahan Indonesia setelah reformasi. *Sistem Politik*, 14, 25-40.
- Simanjuntak, B. A. (1990). *Konflik status dan kekuasaan orang Batak Toba*. Pustaka Sinar Harapan.
- Tambunan. (2020). Peran gereja dalam politik lokal: Studi atas keterlibatan HKBP di Sumatera Utara. *Jurnal Teologi Batak*, 13(1), 78-92.